

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang**

Partisipasi masyarakat sering dibicarakan hampir di seluruh wilayah, baik di daerah kota ataupun di desa yang ada di Indonesia karena dapat dilihat dari besar pengaruh dalam sebuah partisipasi yang terjadi, partisipasi masyarakat juga dapat ditentukan dalam perencanaan atau program yang diadakan di lingkungan masyarakat, kesuksesan program-program juga tidak lepas dari adanya partisipasi masyarakat agar bisa berjalan dengan yang seperti diharapkan, keikutsertaan suatu masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam perencanaan atau program, agar suatu kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentunya dilakukan dengan lancar. Program yang direncanakan pastinya berkaitan besar dengan pembangunan yang ada di lingkungan masyarakat dan dapat juga mensejahterakan masyarakat. Bila masyarakat ingin pembangunan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, Maka sangat diperlukan partisipasi dari masyarakat dalam menjalankan kegiatan pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat sendiri juga dibutuhkan kesadaran dari warga masyarakat akan minat kesukarelaan dan kepentingan yang strategi yang diterapkan adalah strategi penyadaran.<sup>1</sup>

Peran masyarakat dalam pembangunan di era sekarang ini tidak hanya menjadi suatu objek saja, tapi juga menjadi subjek dari pembangunan yang ada

---

<sup>1</sup> Isbandi Rukminto Adi, 2003. Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas. Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. hal. 206

atau yang akan dilakukan.<sup>2</sup> Prinsip dari pembangunan dipusatkan pada rakyat, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam suatu pembangunan yang terjadi di tempatnya. Masyarakat di harapkan ikut andil dalam kegiatan pembangunan yang ada, karena dengan adanya keikutsertaan dari masyarakat bisa menjadikan suatu kegiatan atau program pemerintah bisa berjalan dengan yang sesuai yang diharapkan.

“Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mengatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi yang ada di Negara Indonesia, yang menjelaskan bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan yang ada di wilayahnya.” “Landasan pemikiran dalam pengaturan desa yang dianut dalam UU No. 32/2004 sesungguhnya tetap mempertahankan apa yang dianut dalam UU No. 22/1999, yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Landasan ini sangat kontras dibanding yang dianut sebelumnya dalam UU No.5/1979 yang dinyatakan secara tegas mengarah pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional.<sup>3</sup>”

“Kemudian adanya PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan desa, termasuk didalamnya tentang

---

<sup>2</sup> Rahardjo Adisasmita, Op.Cit, h. 17

<sup>3</sup> Thomas,2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal Pemerintahan Integratif,. Hal 5

kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh pemerintah kabupaten untuk merumuskan dan membuat peraturan daerah tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya.” Untuk melaksanakan kewenangan yang tertuang dalam PP tersebut, pemerintah desa juga memiliki sumber-sumber pemasukan anggaran yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang suatu program yang akan dilakukan. Hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah adanya kepastian untuk pembiayaannya.<sup>4</sup>

Pentingnya suatu pembangunan yang menyentuh dan terjadi di sebuah desa serta aspek kehidupan masyarakatnya, membuat pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk melakukan suatu pembangunan yang ada ditingkat desa. Dalam merencanakan suatu program juga bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah untuk dirumuskan, suatu program yang baik harus mampu sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang menjadi sasaran dari program yang direncanakan tersebut, semakin beragam dan kompleks kebutuhan dan *problem* dari yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka akan semakin rumit juga penyusunan perencanaan suatu program. Masyarakat juga mempunyai karakteristik tertentu, mempunyai kebutuhan dan minat yang bermacam-macam, kemampuan masyarakat dalam menganalisis situasi yang

---

<sup>4</sup> *Ibid.* Hal 52

dihadapi juga sangat beragam, kemampuan mereka dalam mengambil keputusan juga tidak sama antar masyarakat satu dengan yang lainnya.<sup>5</sup>

Perencanaan program juga memiliki sebuah kemampuan dan keterampilan tertentu antara lain pemahaman tentang makna dan hakikat perencanaan prinsip-prinsip, penyusunan program, kemampuan mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kemampuan untuk memilih dan merumuskan tujuan, kemampuan untuk melihat suatu metode yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan, kemampuan dan keterampilan dalam melibatkan masyarakat setempat dalam proses melakukan perencanaan. <sup>6</sup>

Perencanaan mempunyai banyak arti yang sesuai dengan pandangan masing-masing ahli dan tidak terdapat batasan yang dapat diterima secara umum. Perencanaan adalah sebuah proses menyiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian sebuah tujuan tertentu. <sup>7</sup>

Berdasarkan pengertian diatas menyatakan bahwa perencanaan program itu berjalan secara sistematis, jelas, dan terarah, dengan adanya suatu program yang jelas, dengan perencanaan akan dapat dibedakan antara kebutuhan yang penting dan kebutuhan dan kebutuhan yang kurang penting. Sebuah program yang tidak baik tidak mungkin terjadi secara

---

<sup>5</sup> Aziz Muslim.2009. Metodologi Pengembangan Masyarakat, Yogyakarta: Teras Kompleks Ri Gowok. Hal 119

<sup>6</sup> *Ibid.* Hal 120

<sup>7</sup> *Ibid.* Hal 125

kebetulan, akan tetapi program yang di rencanakan dan di bangun dengan kerangka pemikiran yang matang. Kebutuhan akan adanya perencanaan ini penting karena beragam permasalahan yang dihadapi. Maka perencanaan program dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Penjelasan pada pasal 78 UU NO.6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan saran dan prasana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dijelaskan pada bagian ketiga bahwa dalam pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan berguna untuk mewujudkan kedamaian dan keadilan sosial.<sup>8</sup>

Pembangunan infrastruktur desa harus diutamakan pada partisipasi masyarakat, seperti yang terjadi di Desa Watesprojo Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Keikutsertaan dan partisipasi masyarakat sangat penting demi mewujudkan hasil pembangunan di Desa Watesprojo. Sebagai wujud adanya partisipasi masyarakat di Desa Watesprojo saat ini, telah dibangun berbagai infrastruktur seperti Pembangunan TPT, perbaikan saluran irigasi, paving jalan lingkungan, pembangunan drainase, pembangunan jembatan pertanian, lampu penerangan

---

<sup>8</sup> Rifka Linda Singal. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. Jurnal Pembangunan Desa. Hal 2

jalan dan jalan usaha tani. Selain pembangunan infrastruktur tersebut di Desa Watesprojo dilaksanakan berbagai kegiatan pembangunan yang melibatkan masyarakat seperti bakti sosial (BAKSOS). Bakti sosial ini dilakukan tiap hari jumat, semua warga masyarakat ikut andil berpartisipasi seperti membersihkan masjid, kantor desa, balai desa, dan jalan raya.

Berdasarkan penjelasan diatas yang sudah sebutkan, peneliti tertarik untuk meneliti tentang partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Watesprojo Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. Sehubungan dengan hal ini maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Watesprojo Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto”.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Sejauh mana Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan infrastruktur (Fisik) di Desa Watesprojo Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto ?

## **1.3.Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dan menganalisisPartisipasi Masyarakat dalam Pembangunan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan infrastruktur (Fisik) Desa di Desa Watesprojo Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat teoritis akan di peroleh dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu yang berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk informasi penelitian yang lain berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dapat menjadi suatu bahan masukan bagi Pemerintah Desa Watesprojo Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto dalam melakukan usaha dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di berbagai bidang, khususnya pada pembangunan di Desa tersebut.